

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X

Riszka Indriani^{1*}, Dodik Siswanto²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹riszkaindriani@gmail.com, ²dodik.siswanto@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 19 Mei 2023
Disetujui : 11 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This study was performed to evaluate the implementation of Government's Internal Control System (SPIP) in Work Unit X and develop suggestions for internal control flaws. The results of the 2020 Supreme Audit Agency (BPK) examination showed that of the 11 findings obtained, 9 were findings of deficiencies in the internal control system. This reflects that the internal control conditions in this working unit are still not optimal. Furthermore, there were repeated findings in implementing assistance distribution, a national priority program. This has the potential to hamper the attainment of the objectives and hinder the equitable distribution of education in Indonesia. Work Unit X is one of the government institutions that manages many national priority programs, so it is important for this institution to improve internal control to maintain accountability and minimize findings related to aid distribution. This research is qualitative research and uses a case study strategy. The evaluation of SPIP implementation is carried out using an assessment instrument based on BPKP Regulation Number 5 Year 2021. Data were obtained through observation, documentation, and interviews. Data were analyzed using content analysis to get an overview of the SPIP implementation in Work Unit X so that weaknesses can be identified, and improvements can be made in the future. The results of this research show that SPIP in Work Unit X has met the implementation indicators based on BPKP Regulation Number 5 Year 2021, but still needs improvement in the internal control monitoring element. The evaluation results carried out by internal and external examiners have not been fully followed up, so the improvement process is hampered.

Keywords: *audit finding; government internal control system; government institution; internal control*

PENDAHULUAN

Proporsi temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal cukup besar di lingkungan kementerian/satker pada pemerintah pusat seperti terlihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021. 49% temuan yang didapat merupakan temuan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Kemudian pada IHPS I Tahun 2022, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 44,8% temuan yang didapat merupakan temuan kelemahan SPI. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal pada organisasi pemerintahan masih belum optimal karena masih tingginya persentase temuan kelemahan SPI. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan. Menurut Altamuro & Beatty (2010) dan Farida et al. (2021), peningkatan pemantauan dan penerapan pengendalian internal memiliki pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik pengendalian internal satker maka kualitas pelaporan keuangan juga semakin baik (Abbas et al., 2022).

Lemahnya pengendalian internal dapat mengakibatkan masalah lain di dalam organisasi, di antaranya timbulnya kecurangan (fraud), seperti ditunjukkan pada penelitian Hazaea & Zhu (2022) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi adalah sistem pengendalian internal yang lemah. Selain itu, menurut Indriasih & Sulistyowati (2022) sistem pengendalian internal dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sebagai satker yang mengelola keuangan negara, satker ini harus menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, penting dilaksanakan pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal pada satker pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada instansi pemerintahan dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara serta diatur oleh PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP dapat dijadikan sebagai alat pendeteksi dini atas risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk risiko kecurangan (fraud). Oleh karena itu, penerapan SPIP diharapkan tidak dalam hal administrasi saja namun juga terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi dan menjadi kebutuhan organisasi.

Penelitian terdahulu yang serupa melakukan penilaian SPIP menggunakan indikator kelima komponen SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini tidak hanya menekankan pada 5 (lima) komponen SPIP saja namun juga menghubungkannya dengan tujuan SPIP dan terdapat penilaian atas penetapan tujuan dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu tersebut dilakukan pada pemerintah daerah sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat.

Satuan Kerja (satker) X merupakan salah satu satker di lingkungan pemerintah pusat yang berdiri sekitar tahun 2019. Salah satu tugas dan fungsi yang dijalankan satker ini adalah menyalurkan bantuan pemerintah. Satker X memegang peranan penting dalam tercapainya visi dan misi kementerian karena sebagian besar program prioritas nasional berada pada satker ini. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, satker ini mengelola sekitar 30% anggaran kementerian. Besarnya anggaran yang dikelola, membuat satker ini perlu memiliki pengendalian internal yang baik untuk meminimalisir risiko kecurangan dan memprediksi hambatan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara harus transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Satker X harus menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Satker X tahun 2020 dan 2021, dari 11 temuan yang didapat, 9 temuan merupakan temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pengendalian internal pada satker ini masih kurang optimal. Selain itu, terdapat temuan berulang terkait penyaluran bantuan program prioritas nasional. Terdapat beberapa penerima bantuan yang mendapatkan dana dari program lain yang sejenis, di mana hal ini tidak diperkenankan dalam petunjuk teknis. Kemudian terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak layak menerima bantuan karena tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Temuan tersebut menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan menghambat pencapaian tujuan prioritas nasional. Temuan-temuan tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal seperti tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Kelemahan SPIP dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, di mana indikator pengendalian internal juga dipertimbangkan dalam pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK. Satker X harus menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan pengendalian internal. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi SPIP pada Satker X dengan melihat kesesuaian pelaksanaannya berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

STUDI LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian internal dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi yang andal, tepat waktu, transparan, dan disajikan secara wajar. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi risiko kerugian dan hambatan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian internal juga memiliki keterbatasan dalam penerapannya. Pengendalian internal pada satker pemerintahan diatur dalam Peraturan Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Pemerintah Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa SPIP merupakan proses yang berkesinambungan dan berjalan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, struktur dan proses pengendalian internal, hingga pencapaian hasil/tujuan organisasi yang diterapkan secara menyeluruh di dalam organisasi tersebut. Pelaksanaan SPIP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1236/K/LB/2009 Tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan pengendalian internal yang dibangun, antara lain: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Setiap kegiatan yang dirancang oleh instansi pemerintah, dapat digunakan untuk mencapai lebih dari 1 (satu) tujuan tersebut. Dalam penerapannya, SPIP terdiri atas 5 (lima) komponen antara lain: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Kelima komponen tersebut saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan dari SPIP itu sendiri. Penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik akan melahirkan suasana bekerja yang nyaman dan memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik dan berintegritas. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dibutuhkan penilaian risiko guna mencegah hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Atas identifikasi risiko yang telah dilakukan, direncanakan kegiatan pengendalian untuk mengatasi dan mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, diperlukan komunikasi yang efektif. Terakhir namun tidak kalah penting, perlu adanya pemantauan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan dan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan pengendalian internal pada satker pemerintahan perlu dinilai dan diukur tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Penilaian ini diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan guna mengetahui tingkat kematangan implementasi SPIP yang berkonsentrasi kepada beberapa komponen. Komponen tersebut adalah (1) kualitas penentuan tujuan; (2) implementasi struktur dan proses; dan (3) pencapaian tujuan yang menggambarkan pencapaian pada implementasi SPIP. Evaluasi atas kualitas penentuan sasaran dilaksanakan guna memverifikasi bahwa tujuan dan sasaran yang disusun berorientasi pada hasil, telah sesuai tujuan organisasi, serta turut menimbang isu-isu strategis. Evaluasi atas struktur dan proses dijalankan pada implementasi dari kelima komponen SPIP yang diturunkan menjadi 25 (dua puluh lima) sub komponen. Masing-masing sub memiliki tolak ukur tersendiri dalam menggambarkan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan usaha pengendalian korupsi. (BPKP, 2021)

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai indikator penilaian dan analisisnya. Penelitian Limbong (2022) dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan SPIP pada Puslitbang Transportasi Udara (PTU) dan melihat kendala pelaksanaannya,

serta melihat bagaimana penerapan SPIP dapat mendukung pencapaian kinerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara garis besar, pelaksanaan SPIP pada PTU telah memenuhi kriteria berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung, penerapan SPIP memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja PTU. Penelitian Winarna et al. (2021) meneliti pengaruh SPIP terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian Amelia & Halim (2021) dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP pada Sub Bagian Keuangan atas proses penyusunan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP pada instansi tersebut berada pada level 4 (empat) di mana penerapan SPIP telah efektif namun belum optimal. Pada penerapannya, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum adanya evaluasi pada pembinaan pegawai dan pembatasan akses pada sistem informasi keuangan. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi juga belum dilakukan menggunakan sistem informasi. Penelitian Turangan et al. (2017) dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SPIP telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun belum ada pengawasan internal yang dilakukan karena tidak adanya aparat pengawasan internal. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara tidak langsung, SPIP mendukung pencapaian realisasi belanja dengan baik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus untuk menggali fenomena terkait penerapan pengendalian internal pada Satker X. Menurut Ellet (2018), pendekatan studi kasus evaluasi menggambarkan situasi di mana pemahaman yang lebih mendalam tentang seseorang, divisi, perusahaan, negara, strategi, atau kebijakan diperlukan sebelum keputusan atau tindakan penting dapat diambil. Pendekatan studi kasus evaluasi dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pengendalian internal pada Satker X dan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yang sama secara bersamaan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2019). Analisa dilakukan menggunakan analisis konten untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi SPIP pada Satker X. Peneliti melakukan analisa terhadap dokumen pendukung terkait pelaksanaan pengendalian internal dan melihat kesesuaiannya dengan indikator yang ada pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Kemudian, dilakukan konfirmasi melalui wawancara guna mengkonfirmasi dan menggali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal. Selain itu, peneliti melakukan observasi secara langsung pada Satker X selama 2 minggu yaitu pada tanggal 26 Maret 2023 – 7 April 2023. Kemudian peneliti juga mengikuti kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan SPIP pada satker ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tim dari Inspektorat Jenderal selaku penjaminan kualitas pada penilaian mandiri SPIP.

Analisis dilakukan menggunakan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada reduksi data, peneliti membuat matriks hasil observasi dokumen yang dikelompokkan berdasarkan komponen dan unsur yang berada pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, peneliti melakukan penyederhanaan data mentah yang didapat dari hasil wawancara dengan membuat matrik dengan mengelompokkan jawaban serupa dari para narasumber. Dalam penelitian ini, penyajian data hasil wawancara berupa teks naratif yang didukung dengan tabel ringkasan hasil analisis. Setelah dilakukan penyederhanaan data mentah dan analisis atas hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan atas rumusan permasalahan penelitian ini.

HASIL

Penilaian SPIP dilakukan berdasarkan indikator penilaian pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, di mana penilaian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu penilaian atas penetapan tujuan; penilaian atas struktur dan proses; dan penilaian atas pencapaian tujuan. Penilaian penetapan tujuan terdiri dari penilaian kualitas sasaran strategis dan penilaian strategi dalam mencapai target tersebut. Target ini ditetapkan pada tingkat kementerian dan kemudian diturunkan menjadi sasaran program yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan/program pada setiap satker. Dalam hal ini, sasaran program/kegiatan pada Satker X telah sesuai dengan sasaran strategis tingkat kementerian dan mendukung pencapaian visi dan misi kementerian. Setiap program/kegiatan pada Satker X sesuai dengan sasaran program kementerian dan mendukung pencapaian sasaran strategisnya. Indikator kinerja yang ditetapkan juga baik, jelas, dan terukur, serta berorientasi pada hasil. Penentuan target dilakukan sesuai dengan kemampuan satker dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

Evaluasi atas struktur dan proses dilaksanakan dengan melihat setiap unsur dan parameter dalam kelima komponen SPIP, kemudian menghubungkannya dengan pencapaian keempat tujuan SPIP. Pada Tabel 1 terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi lingkungan pengendalian di dalam satker ini sudah tercipta dengan baik, namun belum ada evaluasi pada sebagian sub unsurnya.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Lingkungan Pengendalian

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Penegakan Integritas dan Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat kebijakan • Kebijakan telah disosialisasikan dan diterapkan • Belum ada evaluasi
Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Standar kompetensi telah dijadikan acuan • Belum ada evaluasi
Kepemimpinan yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Telah mempertimbangkan manajemen risiko dalam membuat kebijakan • Telah ada evaluasi
Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi telah sesuai • Telah ada evaluasi, namun proses perbaikan belum berkelanjutan
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab • Telah ada evaluasi
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat kebijakan • Telah ada evaluasi dan perbaikan • Telah ada upaya peningkatan kompetensi SDM
Perwujudan Peran APIP yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • APIP telah berperan dengan baik
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjalin kerja sama dengan baik • Evaluasi telah dilakukan secara berkala

Sumber: Penulis (2023), data diolah

Satker X telah memiliki kebijakan terkait penegakan integritas dan nilai etika, baik saat pelaksanaan tugas, dalam kegiatan pengelolaan keuangan, dalam hal pengamanan aset, maupun dalam menaati peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini belum diikuti dengan evaluasi rutin yang terjadwal dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satker X telah menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan. Namun dalam pelaksanaannya, POS ini belum diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, evaluasi atas pelaksanaan POS ini belum pernah dilakukan. Belum terdapat evaluasi secara rutin dan berkelanjutan pada pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi dan struktur organisasi. Evaluasi hanya dilakukan saat terjadi kendala atau permasalahan melalui rapat dengan pimpinan.

Pelaksanaan sub unsur penilaian risiko pada satker ini telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya seperti terlihat pada Tabel 2. Satker ini telah melakukan identifikasi risiko dan menetapkan selera risiko dan telah dilakukan evaluasi atas penetapan tersebut. Identifikasi risiko telah dilakukan pada seluruh program di dalam organisasi, serta mempertimbangkan risiko internal dan eksternal. Di dalam register risiko telah terdapat daftar risiko, dampak terhadap organisasi, tindakan pengendalian yang telah dilakukan, pemilik risiko, serta tindakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir risiko.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Penilaian Risiko

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat kebijakan • Telah ada evaluasi
Analisis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko telah dianalisis • Satker telah menentukan prioritas risiko, rencana tindak pengendalian, dan implementasi tindak pengendalian • Pada peta risiko, belum ada risiko terkait kemungkinan terjadinya kecurangan • Telah ada evaluasi

Sumber: Penulis (2023), data diolah

Selain itu, telah terdapat batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh satker. Satker X juga telah menentukan prioritas risiko dan menentukan rencana tindakan pengendalian untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Proses pengelolaan risiko yang dilakukan telah terhubung dengan proses bisnis dan perencanaan satker. Analisis risiko juga telah dilakukan secara memadai. Manajemen risiko yang dijalankan telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat dan telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Namun pada peta risiko belum terdapat risiko terkait kemungkinan terjadi kecurangan.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada satker ini telah berjalan dengan baik seperti terlihat pada Tabel 3, namun belum ada evaluasi secara khusus dalam sistem pengendalian internal. Satker telah melaksanakan reviu atas pencapaian kinerja dan dilakukan secara berjenjang dan kemudian dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rapat pimpinan paling tidak setiap satu bulan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Kegiatan Pengendalian

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Reviu atas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu telah dilaksanakan • Hasil evaluasi ditindaklanjuti
Pembinaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pembinaan SDM sesuai dengan kompetensi dan penugasan • Telah ada evaluasi
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada kebijakan • Telah dievaluasi
Pengendalian Fisik atas Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada kebijakan • Telah dilakukan evaluasi
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan reviu secara periodik
Pemisahan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat pemisahan fungsi • Evaluasi dilakukan secara berkala
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat otorisasi • Telah ada evaluasi
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dilakukan secara akurat dan tepat waktu • Dilakukan rekonsiliasi secara berkala

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat pembatasan akses
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan namun belum optimal
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan • Belum ada evaluasi

Sumber: Penulis (2023), data diolah

Akuntabilitas terhadap sumber dan pencatatan belum berjalan secara optimal, masih terdapat kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, dan masih terdapat beberapa transaksi yang belum tercatat. Namun hal tersebut telah diperbaiki melalui koreksi saat penyusunan laporan keuangan *audited*. Dokumentasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan dokumentasi atas peristiwa penting telah dilakukan. Namun dokumentasi ini belum dievaluasi secara khusus. Evaluasi dilakukan Ketika terdapat kendala atau permasalahan saja.

Pelaksanaan unsur informasi dan komunikasi pada satker ini telah berjalan dengan baik seperti terlihat pada Tabel 4 bahwa informasi tersedia dan mudah diakses serta komunikasi telah berjalan secara efektif. Informasi terkait satker ini mudah untuk diakses oleh pihak berkepentingan sesuai dengan kebutuhannya. Satker X telah melakukan evaluasi atas pemberian layanan melalui survey kepuasan masyarakat. Sebagai upaya berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengatasi isu negatif, Satker X menerbitkan hasil survei di lamannya serta membuat podcast untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang sering muncul. Komunikasi antar pegawai dilakukan secara verbal, melalui grup Whatsapp, zoom, atau media lain yang dapat digunakan dalam mempermudah jalannya tugas dan fungsi masing-masing pegawai, baik dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan, pengelolaan keuangan, maupun dalam pengelolaan aset. Setiap komunikasi dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi atas informasi dan komunikasi telah dilakukan melalui rapat dengan pimpinan dan telah ditindaklanjuti.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Informasi dan Komunikasi

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Informasi yang Relevan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tersedia dan mudah diakses • Strategi dan manajemen risiko telah dikomunikasikan • Rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan • Terdapat wadah pengaduan internal yang telah dievaluasi
Komunikasi yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada evaluasi terhadap komunikasi yang efektif

Sumber: Penulis (2023), data diolah

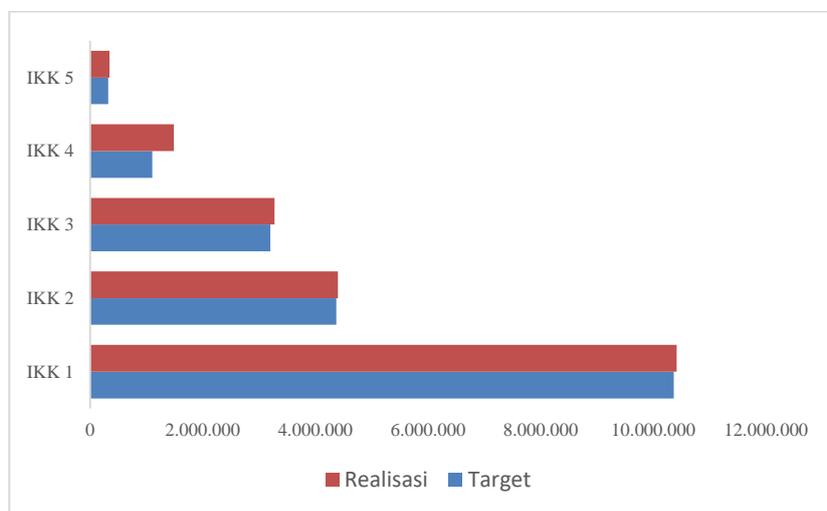
Pelaksanaan unsur pemantauan pengendalian internal pada satker ini secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup baik seperti terlihat pada Tabel 5 di mana pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan namun hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Pemantauan pelaksanaan pengendalian internal telah dilakukan namun belum dikelola dengan baik. Pemantauan terhadap manajemen risiko juga telah dilakukan namun belum dilakukan secara berkala. Evaluasi terpisah dan reviu terhadap manajemen risiko telah dilakukan setiap tahun, namun hasil evaluasi belum ditindaklanjuti sepenuhnya.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Pemantauan Pengendalian Internal

Sub Unsur	Penerapan pada Satker X
Pemantauan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan telah dilaksanakan • Hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti
Evaluasi Terpisah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terpisah dan reviu manajemen risiko telah dilaksanakan secara berkala

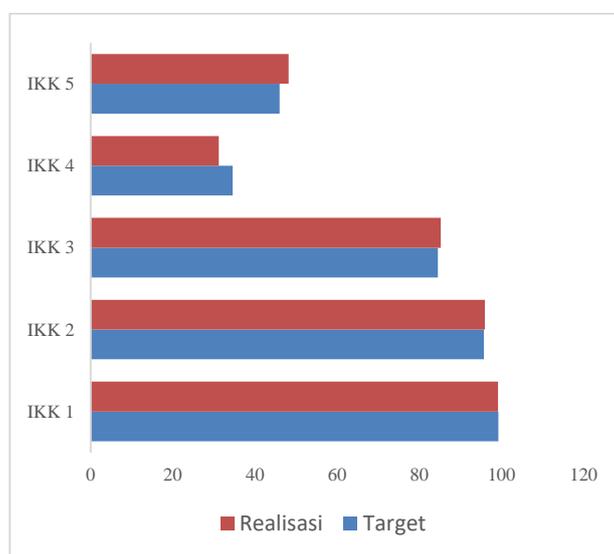
Sumber: Penulis (2023), data diolah

Evaluasi atas pencapaian tujuan menggunakan indikator dari tujuan SPIP yakni efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan instansi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan. Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa capaian output Satker X pada seluruh program melebihi 100%.



Gambar 1. Grafik Capaian Output Satker X Tahun 2021
Sumber: Satker X (2021), data diolah

Kemudian untuk capaian outcome dapat dilihat pada Gambar 2, Satker X telah dapat membantu sasaran strategis tingkat kementerian dan berpartisipasi meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Sebagian besar capaian outcome tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih ada satu indikator yang capaiannya sebesar 90,25%.



Gambar 2. Grafik Capaian Outcome Satker X Tahun 2021
Sumber: Satker X (2021), data diolah

Laporan keuangan Satker X mendapatkan opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Namun dalam 2 (dua) tahun berjalannya, pada hasil pemeriksaan BPK masih terdapat temuan yang berulang terkait pengelolaan bantuan. Selama 2 tahun beroperasi, tidak terdapat temuan terkait aset pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Satker X, baik temuan terkait administrasi aset, permasalahan hukum pada aset Satker X. Kemudian menurut laporan yang dihasilkan dari sistem satker ini, 90% kondisi BMN berfungsi dengan baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, penetapan sasaran harus sesuai dengan visi, tugas, dan fungsi satker, serta orientasi terhadap hasil. Kemudian indikator kinerja harus spesifik dan relevan, realistis, serta dievaluasi secara berkala. Selain itu, target kinerja yang ditetapkan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memperhatikan capaian tahun lalu, dan dievaluasi secara berkala. Melihat indikator penilaian penetapan sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja sesuai peraturan tersebut, kualitas penetapan tujuan pada Satker X sudah baik. Indikator dan target kinerja satker ini disusun dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan juga dapat diukur serta dapat dicapai dalam periode waktu tertentu.

Lingkungan pengendalian menggambarkan kondisi di dalam organisasi dalam membangun kesadaran pentingnya pengendalian internal dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Dalam hal ini, peran pimpinan penting dalam memberikan teladan dalam menjalankan nilai integritas dan etika. Secara keseluruhan penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Satker X telah dilaksanakan dengan baik, namun beberapa perbaikan seperti pada sub unsur penegakan integritas dan etika perlu dilakukan. Penerapan POS belum dilaksanakan secara konsisten sehingga perlu peningkatan dan evaluasi pada penerapan POS tersebut. Kemudian pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi, belum ada evaluasi secara khusus yang dilakukan namun sebenarnya evaluasi dilakukan melalui rapat dengan pimpinan setiap minggu dengan agenda berbeda-beda sesuai kebutuhan.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Limbong (2022) yang menunjukkan bahwa kelemahan penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Puslitbang Transportasi Udara (PTU) terdapat pada pengelolaan kompetensi SDM yang dirasa belum optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian hasil penelitian Amelia & Halim (2021) menunjukkan bahwa pada Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, kelemahan penerapan unsur lingkungan pengendalian berada pada pembinaan SDM di mana belum pernah dilakukan diklat, serta belum dilakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi termasuk evaluasi pada pendelegasian wewenang dan tata kelola struktur organisasi. Sedangkan pada penelitian Yurniwati & Rizaldi (2015) ditemukan bahwa kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah Padang Panjang memiliki kelemahan pada aspek kepemimpinan dan kebijakan rotasi pegawai

Unsur penilaian risiko penting bagi pencapaian tujuan organisasi karena hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dapat diminimalisir melalui identifikasi risiko. Pelaksanaan unsur penilaian risiko pada Satker X telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya penambahan risiko-risiko yang belum tercantum. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Turangan et al. (2017) di mana penerapan penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian Limbong (2022), penerapan manajemen risiko pada PTU belum konsisten dan terintegrasi, serta tidak ada evaluasi secara berkala untuk memperbaharui kebijakan tersebut. Hasil penelitian Amelia & Halim (2021) menunjukkan bahwa pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman belum terdapat daftar risiko terkait pemrosesan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dan sistem untuk memantau perubahan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan memadai, diperlukan tindakan pengendalian yang dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian pada Satker X telah berjalan dengan baik. Setiap sub unsur telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala kecuali untuk sub unsur dokumentasi atas kejadian penting, masih belum terdapat evaluasi secara khusus. Pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian yang baik juga terjadi pada Perguruan Tinggi Negeri X berdasarkan penelitian Zamzami & Faiz (2015). Namun hal tersebut tidak sama pada PTU, menurut Limbong (2022) penetapan dan reviu kebijakan belum optimal dan evaluasi atas kinerja pada PTU belum dilakukan secara berkala.

Data dan informasi yang dikomunikasikan dengan baik dapat membantu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Secara keseluruhan, penerapan unsur informasi dan komunikasi pada Satker X telah berjalan dengan baik. Informasi tersedia dengan baik dan mudah diakses, evaluasi atas komunikasi yang efektif dilakukan melalui SKM. Hal serupa juga terjadi

pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman di mana unsur informasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik pada penelitian Amelia & Halim (2021). Menurut hasil analisisnya, unsur informasi dan komunikasi pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman telah berada pada level optimum. Namun hasil penelitian Limbong (2022) menunjukkan pada PTU informasi belum tersedia dengan lengkap serta belum ada evaluasi atas komunikasi yang efektif.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal pada organisasi dan untuk memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti secara tepat dan dilakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal pada Satker X belum berjalan dengan optimal karena hasil evaluasi belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Pada PTU, pemantauan sistem pengendalian belum dikelola dengan baik dan belum ada evaluasi secara berkala dalam pemantauan manajemen risiko (Limbong, 2022). Kondisi yang lebih baik ditemukan pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman di mana pemantauan berkelanjutan telah dilakukan secara efektif walaupun evaluasi masih dilakukan secara manual.

Penilaian selanjutnya yang dilakukan adalah penilaian atas pencapaian tujuan yang diukur melalui indikator dari tujuan SPIP yakni efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan instansi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan. Evaluasi atas efektivitas dan efisiensi dilakukan dengan melihat capaian output dan capaian *outcome* dari program/kegiatan dari satker. Capaian output digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan, sedangkan capaian *outcome* digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Capaian output Satker X pada seluruh program melebihi 100%. Hal ini menandakan bahwa Satker X telah dapat menjalankan program dan kegiatannya secara efisien. Satker ini telah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal, bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Capaian *outcome* tahun 2021 paling kecil terdapat pada satu indikator yang capaiannya sebesar 90,25%. Akan tetapi capaian ini masih tergolong baik dengan capaian di atas 90%. Dalam penilaian capaian *outcome* pada kertas kerja penilaian pencapaian tujuan SPIP, capaian di atas 90% masih termasuk pada gradasi level tertinggi. Sehingga berdasarkan capaian output dan capaian *outcome*, dapat disimpulkan bahwa Satker X telah menjalankan programnya secara efektif dan efisien.

Penilaian indikator keandalan pelaporan keuangan dilakukan dengan melihat kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang dapat dilihat berdasarkan opini atas laporan keuangan. Indikator tertinggi untuk penilaian keandalan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 didapat dengan meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut serta tidak terdapat temuan berulang. Sedangkan Satker X baru berdiri selama 2 tahun dan masih memiliki temuan berulang sehingga masih diperlukan perbaikan pada aspek ini.

Penilaian pengamanan aset dilihat dari keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik. Penilaian keamanan administrasi merupakan penilaian kualitas penatausahaan BMN dari sisi administrasi aset yang dilihat berdasarkan temuan BPK yang berkaitan dengan administrasi terkait BMN dalam 5 (lima) tahun terakhir. Penilaian keamanan hukum merupakan penilaian atas upaya satker menjaga aset dari permasalahan hukum seperti persengketaan, gugatan, dan peralihan kepemilikan yang dilihat dari catatan pada hasil pemeriksaan BPK terkait permasalahan hukum aset. Tidak adanya temuan terkait aset pada satker ini menunjukkan bahwa keamanan administrasi dan keamanan hukum aset di Satker X telah berjalan dengan baik. Hasil penilaian maksimal untuk penilaian kondisi fisik aset berdasarkan Peraturan BPKP Tahun 2021, dapat dicapai jika 100% kondisi aset selama minimal 5 tahun berfungsi dengan baik. Berdasarkan data yang didapat, lebih dari 90% aset berfungsi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa keamanan fisik aset pada Satker X juga telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.

Responden dalam penelitian ini terbatas pada pegawai pada organisasi yang menjadi objek penelitian. Walaupun analisis didukung dengan analisis beberapa dokumen, namun informasi yang didapat masih terbatas pada informasi internal saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah responden dari unit utama dan APIP agar informasi yang didapat lebih luas dari beberapa sudut pandang.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPIP pada Satker X dan mengidentifikasi kelemahan pelaksanaannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan implementasi SPIP pada satker ini telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi seluruh indikator pelaksanaan SPIP pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan di antaranya, unsur lingkungan pengendalian. Pelaksanaan POS sebagai acuan menjalankan kegiatan belum diimplementasikan secara konsisten, kemudian belum dilakukan evaluasi atas penerapan POS tersebut. Pelaksanaan POS secara konsisten dan menyeluruh harus diterapkan sesegera mungkin dan dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala atas pelaksanaan POS tersebut guna memperbaiki kinerja dalam pemberian layanan dan pelaksanaan kegiatan pada satker ini. Selain itu penguatan juga masih diperlukan pada unsur pemantauan pengendalian internal. Hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga proses perbaikan terhambat. Hal ini mengakibatkan temuan berulang masih terjadi dalam 2 tahun pertama satker berjalan. Satker X perlu melakukan evaluasi secara berkala atas seluruh aspek kegiatan dan pengendalian internal, serta mendokumentasikan hasil evaluasi tersebut dengan baik. Kemudian satker ini juga perlu membentuk tim untuk menangani tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemeriksa eksternal agar tindak lanjut tersebut dapat dipantau perbaikannya.

REFERENSI

- Abbas, D. S., Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 461–474. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>
- Altamuro, J., & Beatty, A. (2010). How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting? *Journal of Accounting and Economics*, 49(1–2), 58–74. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.07.002>
- Amelia, D., & Halim, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 323–336. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.133>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Satker/Pemerintah Daerah*.
- Ellet, W. (2018). *The Case Study Handbook : A Student's Guide* (Revised Ed). Harvard Business Review Press.
- Farida, I., Mulyani, S., Akbar, B., & Setyaningsih, S. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of Financial Information. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 222–236. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7809941>
- Hazaea, S. A., & Zhu, J. (2022). Internal audit system and financial corruption in public institutions: case study of Yemeni public telecommunication corporation. *International Journal of Business Excellence*, 27(3), 360–386. <https://doi.org/10.1504/IJBEX.2022.124541>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Limbong, B. J. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mendukung Pencapaian Kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20529259&lokasi=lokal>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Turangan, J. C., Saerang, D. P. E., & Pusung, R. J. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Internal Control) Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18432.2017>
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government Internal Control System and Local Government Administration Performance: Evidence from Indonesian Local Governments. *Public Finance Quarterly*, 66(2), 88–107. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5
- Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 844–850. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.11.111>
- Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003>